PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU (BDT) DI KELURAHAN HUANGOBOTU KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO

JURNAL

MARLENI HUSAIN
NIM. DO2416304

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU (BDT) DI KELURAHAN HUANGOBOTU KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO

Marleni Husain[1], Trisusanti Lamangida[2], Umar Sako Baderan[3]
[1)]Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: marleni-husain@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the integrated database management (BDT) in Huangobotu Village, Dungingi District, Gorontalo City. This research is included in the type of descriptive research with a qualitative research approach. The results of the study that of the 4 aspects studied related to Integrated Database Management namely the aspects of Planning, Organizing, Implementation and Evaluation, there are two aspects that have not been run optimally in the aspects of planning and organizing. In the planning aspect found in accordance with observations by researchers there was no renewal of BDT carried out by the village government, the second aspect, namely organizing, was found that the related parties that carried out integrated database management in carrying out their work were not optimal, apart from that also that only certain people who can verify the database.

Keywords: Management, BDT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan basis data terpadu (BDT) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa dari 4 aspek yang diteliti terkait dengan Pengelolaan Basis Data Terpadu yakni aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta Pengevaluasian, ada dua aspek yang belum berjalan dengan optimal yani aspek perencanaan dan pengorganisasi. Pada aspek perencanaan dalam ditemukan sesuai dengan pengamatan oleh peneliti tidak adanya pembahahruan BDT yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, aspek kedua yakni pengorganisasin ditemukan bahwa pihak terkait yang melakukan pengelolaan Basis Data Terpadu dalam melaksanakan pekerjaannya belum optimal, selain itu pula bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan verifikasi data basis tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan, BDT*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II (tahun 2010-2014). Dengan target menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari 14,1% di tahun 2009 ke 8-10% pada akhir tahun 2014 pemerintah menetapkan strategi dan program untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden RI nomor 15 tahun

2010. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu:

1. Kelompok program berbasis individu/keluarga/rumah tangga, atau program Klaster 1, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk di Klaster 1 adalah program subsidi beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (Program Raskin), program bantuan untuk siswa miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, atau Program Klaster 2, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), termasuk PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan dan lain-lain.
3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, atau Program Klaster 3, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kelompok ini (TNP2K, 2015).

Selain ketiga jenis program tersebut di atas, juga dilaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan lainnya yang juga bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan landasan Perpres nomor 15 tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI untuk menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh wakil kepala daerah untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai keputusan Tim Nasional.

Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin, antara lain Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Suatu analisis yang dilakukan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 menunjukkan bahwa sistem penargetan program-program tersebut masih kurang efektif karena tingkat kesalahan inklusi dan kesalahan

eksklusi yang cukup tinggi. Hasil Susenas tahun 2009 tersebut juga mengindikasikan bahwa hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima manfaat sekaligus tiga program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah saat itu yaitu Raskin, Jamkesmas dan BLT.

Kurang efektifnya penargetan program-program tersebut disebabkan antara lain karena masing-masing penyelenggara program menggunakan basis-data yang berbeda beda untuk mengidentifikasi sasaran program. Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan bahwa keberadaan basis-data yang terpadu (unified database) yang dapat digunakan oleh banyak program untuk penargetan peserta/penerima manfaat program dapat meningkatkan secara signifikan efektifitas program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan.

Kegiatan Pengelolaan BDT adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga basis data terpadu. BDT merupakan hasil PPLS 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014, misalnya rumah tangga pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Pemutakhiran Basis Data Terpadu, 2015), kegiatan BDT perlu dilakukan karena selama periode 2011-2015 telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan program perlindungan sosial, dan pada kegiatan sebelumnya yaitu PPLS 2011 dari hasil uji petik TNP2K (nasional) hanya tedapat 90-95% Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditemukan serta ditemukan data yang tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukan data yang dihasilkan tidak akurat dan cakupan pendataan yang kurang.

Kondisi kemiskinan dirasakan oleh Indonesia akibat krisis ekonomi yang dinyatakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Perlindungan Sosial di Indonesia 2014) bahwa sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam periode 1971-1997. Pada saat itu perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) nasional. Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Kegiatan BDT dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Tujuan utama kegiatan BDT adalah

untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga BDT sebagai data dan informasi mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengelolaan kegiatan BDT dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama dari reformasi administrasi. Karena salah satu budaya birokrasi yang sangat penting bagi reformasi birokrasi adalah berkembangnya pengelolaan dalam instansi pemerintah. Pengelolaan sangat penting karena memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis dan melakukan *improvement*. Menurut Vontana (2009:20), pengelolaan adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi *input* menjadi *output* yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, dan lingkungan.

G.R Terry (The Liang Gie, 2000: 21) tentang Pengelolaan (manajemen). Pengelolaan didefinisikan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui kegiatan manajemen maka George R. Terry (The Liang Gie, 2000: 21) mengungkapkan bahwa pengelolaan bisa berjalan dengan baik bila mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*) dan Pengendalian (*controlling*)

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:3). Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi kota Gorontalo. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 2 bulan yakni dari bulan Januari sampai dengan Februari 2020.

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer
   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah berjumlah 8 orang
2. Sumber data sekunder
   Data sekunder dalam hal ini merupakan pelengkap yang diambil dari sumber lain, artinya menggunakan sumber-sumber yang sebelumnya tidak ditetapkan tetapi

diperlukan dalam permasalahan yang dibahas.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi
   Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan secara mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan.
2. Wawancara
   Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan semua informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber nonvisual yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini data yang dijaring berupa dokumen yaitu meliputi profil lokasi penelitian, data pegawai dan data sarana prasarana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Fokus dalam kajian penelitian ini adalah Pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Dalam mengurai pengelolaan BDT tersebut, peneliti menggunakan teori dari G.R Terry (The Liang Gie, 2000: 21) tentang Pengelolaan (manajemen).

1. Planning

Perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut harus dilakukan. Dalam aspek perencanaan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai: “kegiatan apa saja yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan BDT”? informan yang berinisial SM, selaku Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo sebagai berikut:

> *“1) pertemuan sekaligus sosialisasi, b) abservasi lapangan/rumah penduduk” (12-02-2020, SM, Lurah)*

Demikian pula disampaikan oleh informan lainnya yang terurai sebagai berikut:

> *“1) Mencari informasi awal tentang data penduduk dan Kepala Keluarga, 2) Analisis dan Evaluasi data awal, 3) Identifikasi data penduduk yang kurang mampu, 4) Monitoring, pemantauan kondisi masyarakat di lapangan” (10-02-2020, SI, Ketua RW)*
>
> *“Melaksanakan pendataan/Survey langsung ke responden” (19-02-2020, YHA, kasie kesra)*
>
> *“Melakukan monitoring di setiap lingkungan” (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)*

Selanjutnya masih dalam hal perencanaan, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai: “Siapa saja yang dilibatkan dalam penentuan arah dan tujuan pengelolaan BDT”? informan yang berinsial SM, selaku

Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan:

> *"1) kader-kader PKK, 2) Ketua-ketua RT, 3) Kasie kesra, 4) Informan yang mengetahui keadaan hidup rumah tangga seseorang" (12-02-2020, SM).*

Apa yang disampaikan oleh SM tersebut, didukung pula oleh informan lainnya sebagaiman terangkum sebagai berikut:

> *"1) Pemerintah Kelurahan, 2) Organisasi yang ada di tingkat kelurahan, 3) Pengurus RT/RW, 4) Masyarakat umum" (10-02-2020, SI, Ketua RW)*
>
> *"1) Aparat yang terdekat dengan responden, 2) Ketua-Ketua RT" (29-01-2020, AA, masyarakat)*
>
> *"1) Ketua-Ketua RT dan Ketua-Ketua RW, 2) Aparat Kelurahan yang mengetahui wilayah atau kondisi masyarakat yang termasuk dalam anggota BDT" (10-02-2020, YH, operator)*
>
> *"1) Lurah, 2) Kasie Kesra" (11-02-2020, DP, Ketua RW)*
>
> *"1) Pengurus RT/RW, 2) Pemerintah wilayah terkait, yakni pemerintah kelurahan dan kecamatan" (27-02-2020, MD, Ketua RW)*

Adisasmita (2011:22) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Bila mengkaji teori ini maka perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Huangobotu dalam pengelolaan Basis Data Terpadu secara teoritis sudah berjalan dengan baik, namun tujuan dari adanya perencanaan tersebut belum tercapai dengan maksimal dimana Basis Data Terpadu yang dibangun belum terbaharui sesuai dengan keadaan yang sekarang. Selain itu bahwa terjadinya ketidakadilan dalam pendataan sehingga menyebabkan tidak optimalnya hasil pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan mengenai perencanaan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi kota Gorontalo dapa disimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aspek perencanaan dimana dalam kegiatan perencanaan pihak kelurahan telah melakukan kegiatan berupa sosialisasi, pendataan, survei, observasi dan hal-hal terkait dalam proses penetapan masyarakat yang masuk dalam Basis Data Terpadu ataupun kelayakan masyarakat untuk tetap dalam kategori yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan perencanaan tersebut, telah melibatkan pihak-pihak terkait yang paling mengetahui mengenai status dari masyarakat yang berhak masuk dalam Basis Data Terpadu. Namun, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pihak kelurahan belum terlalu fokus pada perencanaan perubahan data atau melakukan pembaharuan data, hal ini terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat bahwa masih ada masyarakat yang masih terdata pada BDT namun statusnyta sudah tidak layak lagi masuk pada kategori miskin sebagaimana aturannya.

2. Organizing

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mengurai bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dalam proses pengelolaan Basis Data Terpadu, peneliti mengajukan pertanyaan berupa: "Seperti apa pembagian kerja dalam pengelolaan BDT"? terkait dengan pertanyaan ini, SW selaku Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan:

> *"1) kader-kader PKK dan Ketua-ketua RT bertugas mengumpulkan data dilapangan, 2) Kasie Kesra dan staf bertugas menginput data" (12-02-2020, SM).*

Demikian pula informan lain hampir sama jawabannya dengan informan sebelumnya, dimana jawaban para informan tersebut terurai sebagai berikut:

> *"Tim work/kerja dibagi dalam 2 bagian yakni: 1) bagian lapangan dan 2) bagian pengelola data" (10-02-2020, SI, Ketua RW)*
>
> *"1) Pendataan atau survey lapangan, 2) Penginputan dan Pengelolaan" (10-02-2020, YH, operator)*
>
> *"Mengumpul data dan menginput" (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)*
>
> *"Dibagi sesuai lokasi RT/RW" (27-02-2020, MD, masyarakat)*

Selain pertanyaan mengenai pembagian kerja, peneliti juga mengajukan pertanyaan lain terkait dengan pengorganisasian dengan pertanyaan: "Apakah semua yang menangani BDT mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing"? informan SW selaku Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan:

> *"Iya, tahu dengan tugas yang diberikan terkait BDT" (12-02-2020, SM).*

Namun jawaban dari informan SM tersebut sedikit berbeda dengan jawaban yang disampaikan oleh informan SI, dimana belaiu menyampaikan"

> *"Ya, semua mengetahui, namun belum optimal dalam melaksanakan tupoksinya" (10-02-2020, SI, Ketua RW).*

Demikian pula disampaikan oleh informan AA, dimana beliau menyampaikan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang memahami dan ditunjuk sebagai verifikator dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:

> *"Tidak semua yang menangani, namun orang-orang yang sudah khusus yang ditunjuk sebagai tim verifikasi" (29-01-2020, AA, Ketua RW).*

Jawaban kedua informan sebelumnya tersebut juga berbeda dengan informan lainnya, dimana informan selajutnya lebih condong jawabannya sama dengan jawaban dari informan YH, sebagai berikut:

> *"Ya, sebab dalam penangan BDT tugas pokok dan Fungsi masing-masing harus dikuasai agar semua pelaksanaan dapat terarah" (10-02-2020, YH, operator)*
>
> *"Iya, dalam penanganan BDT tugas dan fungsi masing-masing harus dikuasai" (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)*

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diatas mengenai

pengorganisasian yang dilakukan terkait pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengorganisasian belum cukup optimal, dimana dalam pelaksanaannya belum terlalu optimal dikuasai, selain itu bahwa pelaksanaan BDT tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Hasibuan (2006:118), pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan. Jika di sesuaikan dengan teori yang diangkat oleh Hasibuan ini, maka kajian mengenai pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Huangobutu dalam pengelolaan Basis Data Terpadu belum secara optimal dapat dilakukan.

3. Actuating

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing dan mengatur segala kegiatan bawahan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam proses pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, peneliti mengajukan pertanyaan yakni: "Apakah dalam pelaksanaan kegiatan semuanya mengacu pada perencanaan yang telah ditentukan?" informan SW selaku Lurah menyatakan sebagai berikut:

> *"Iya, sesuai dengan rencana dan target" (12-02-2020, SM).*

Terkait dengan pertanyaan tersebut dan jawaban yang diberikan oleh informan SW, informan lain yang diwawancarai juga cenderung sama dengan jawaban yang telah disampaikan oleh informan SM diatas, dimana jawaban para informan diurai sebagai berikut:

> *"Yang jelas itu sesuai perencanaan dulu" (29-01-2020, AA, Ketua RW)*
>
> *"Ya, jika tidak mengacu dalam perencanaan semuanya tidak akan terarah" (10-02-2020, YH, operator)*
>
> *"Iya, semua mengetahuinya dan mengacu pada perencanaan yang telah ditentukan" (19-02-2020, YHA, kasie kesra)*
>
> *"Ya, sesuai rencana dan target" (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)*

Selanjutnya masih terkait dengan aspek pelaksanaan, peneliti mengajukan pertanyaan: "Apakah yang ditugaskan di bagian BDT saling mengingatkan satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan? Seperti apa?". Informan SM selaku Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan sebagai berikut:

> *"Iya, saling mengingatkan, contoh: terkait KK yang tidak memenuhi syarat dalam BDT" (12-02-2020, SM)*
>
> *"Ya, misalnya mengingatkan ketentuan-ketentuan masyarakat yang akan masuk dalam BDT" (10-02-2020, SI, Ketua RW)*
>
> *"Ya, semua petugas saling mengingatkan dan merembuk apa yang akan di kerjakan" (29-01-2020, AA, Ketua RW)*

"Iya, setiap petugas saling mengingatkan dan membentuk kerja sama yang baik" (19-02-2020, YHA, kasie kesra)

"Ya, seperti penginputan dan pengolahan data terkait KK yang tidak memenuhi syarat" (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada para informan yang mengakut aspek pelaksanaan dalam pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa aspek pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, dimana pihak-pihak yang terlibat didalamnya telah melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya pemahaman yang baik oleh para pihak terkait pelaksanaannya.

Menurut Westra peaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya Adisasminta (2011). Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara kepada para informan, jika dikaji dengan teori dari Westra tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Huangobotu dalam pengelolaan Basis Data Terpadu sudah baik.

4. Controlling

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Pengawasan sangat penting guna evaluasi terhadap usaha yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan sasaran dan target selanjutnya.

Terkait dengan aspek pengawasan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan berupa: "Seperti apa pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan BDT? Informan SM, selaku Lurah di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan sebagai berikut:

"Dalam bentuk evaluasi kepada semua yang terlibat dalam tugas mendata BDT" (12-02-2020, SM, Lurah).

Jawaban yang disampaikan oleh informan SM, hampir sama dengan jawaban dari informan lainny, namun masih mengerucut pada apa yang ditanyakan oleh peneliti, dimana jawaban informan dapat dilihat sebagai berikut:

"Memastikan kondisi lapangan" (10-02-2020, SI, Ketua RW)

"Setiap petugas telah diberikan sosialisasi tentang tata cara pendataannya. Yang jelas yang di data yang benar-benar yang tidak mampu ekonominya" (29-01-2020, AA, Ketua RW)

"Setiap petugas harus diberikan sosialisasi tentang kondisi lapangan dan data masyarakat yang benar-benar tidak mampu ekonominya" (19-02-2020, YHA, kasie kesra)

"Evaluasi kepada semua yang terlibat dalam pengelolaan BDT" (20-02-2020, FR, Kepala Lingkungan)

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti yang masih terkait dengan aspek pengawasan adalah: “Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan? Apa saja yang dievaluasi dan siapa yang melakukannya? Informan SM selaku Lurah Huangobotu menyampaikan sebagai berikut:

> *“1) evaluasi dalam bentuk rapat dan pemaparan oleh masing-masing orang yang ditugaskan mendata, 2) yang dievaluasi adalah data yang ada, apakah sesuai dengan kriteria masuk dalam BDT” (12-02-2020, SM, Lurah).*

Pun demikian disampaikan oleh para informan lainnya yang terangkum sebagai berikut:

> *“1) mencocokkan data yang masuk dengan kondisi lapangan, 2) memastikan kevalidan data, 3) yang melakukan evaluasi adalah bagian evaluasi data” (10-02-2020, SI, Ketua RW)*
>
> *“Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali dan yang melakukan evaluasi yakni para petugas dan para tim yang berasal dari Dinas Sosial” (29-01-2020, AA, Ketua RW)*
>
> *“Proses evaluasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan yang dilaksanakan atau dihadiri oleh ketua-ketua RT/RW, LPM, Tokoh masyarakat dan perwakilan peserta BDT” (10-02-2020, YH, operator)*
>
> *“1) Evaluasi melalui rapat, 2) Mengevaluasi data yang ada, 3) Ketua RT/RW, Kasie Kesra dan Lurah” (19-02-2020, YHA, kasie kesra)*

Dari jawaban yang disampaikan oleh para informan sesuai dengan hasil wawancara terkait aspek pengawasan dalam pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Goprontalo dapat dismpulkan bahwa aspek ini sudah berjalan dengan baik, dimana proses pengawasan dilakukan oleh pihak terkait yakni pihak kelurahan serta pihak lainnya yang terkait dengan Basis Data Terpadu du Kelurahan. Selain itu bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan lebih difokuskan pada aspek pencocokan data yang ada dengan kondisi dilapangan, memastikan kevalidan data, serta penyaluran bantuan yang diberikan.

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Pendapat dari Sutarno NS diatas dalam hal pengawasan dan jika dikomparasikan dengan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu sudah sesuai dengan kajian teoritis. Artinya dari sisi aspek pengawasan sudah disesuaikan dengan apa yang telah menjadi tujuan ataupun rencana dari adanya pengelolaan Basis Data Terpadu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, terkait dengan Pengelolaan Basis Data Terpadu di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa dari 4 aspek yang diteliti terkait dengan Pengelolaan Basis Data

Terpadu yakni aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta Pengevaluasian, ada dua aspek yang belum berjalan dengan optimal yani aspek perencanaan dan pengorganisasi. Pada aspek perencanaan dalam ditemukan sesuai dengan pengamatan oleh peneliti tidak adanya pembahahruan BDT yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, aspek kedua yakni pengorganisasin ditemukan bahwa pihak terkait yang melakukan pengelolaan Basis data dalam melaksanakan pekerjaannya belum optimal, selain itu pula bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan verifikasi data basis tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan pola pikir dalam pengelolaan Basis data Terpadu yang disesuaikan denga aturan yang berlaku serta adanya pembaruan pada setiap periodenya
2. Perlu memahamkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan Basis Data Terpadu untuk mampu melaksanakan kegiatan secara optimal dan secara bersama mengetahui isi dari Basis Data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta

Arikunto, Suharsimi. 1986. Pengelolaan Kelas dan Siswa. Rajawali. Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2015. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.

Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. BumiAksara. Jakarta

Moelong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung

Sugiyono. 2011. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

Sutarno NS. 2004. Perpustakaan Dan Masyarakat. Jakarta. Sagung Seto.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2015. Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial. Jakarta

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Buku Pembangunan Basis Data Terpadu (BDT). Jakarta